

# CAKRAWALA PENDIDIKAN

**FORUM KOMUNIKASI ILMIAH  
DAN EKSPRESI KREATIF  
ILMU PENDIDIKAN**

**Internalisasi Nilai-nilai Entrepreneurship Dalam Rangka  
Membentuk Perilaku Kewirausahaan Melalui Pendidikan  
Terintegrasi**

**Kepemimpinan Dan Kecerdasan Emosional**

**Peranan Layanan Bimbingan Dan Konseling Untuk  
Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di Sekolah**

**Meningkatkan Peran Kelompok Penekan Dalam Percaturan  
Politik**

**Fenomena Perilaku Sosial Komunitas Public United Not  
Kingdom (PUNK)**

**The Influence Of Gender In Language Usage**

**Using Sorogan Method In Learning English For Beginners**

**Teaching Simple Present Tense Using Short Answers Game For  
The First-year Of University Students**

**Analisis Faktor Eksploratori Komponen Utama Penyebab Inflasi  
Di Kota Malang**

**Analisis Model Antrian Peserta Pada Loket F Di Badan  
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan**

**Membangun Karakter (Sikap) Partisipasi Peduli Lingkungan  
Pada Siswa Melalui Program BSM (Bank Sampah Malang)**

**Using Picture Book As Media To Improve Reading Motivation  
On Junior High School Student**

**Escalating Ideas Using Creative Visualization Technique In  
Writing Ability**

**The Effectiveness Of Kwl (Know, Want To Know, Learned)  
Technique In Teaching Reading For English Department  
Students**

**The Problem Of Translating English Phrases Into Indonesian  
For Islamic Scholar Of**

ISSN 1410-9883

**CAKRAWALA PENDIDIKAN**  
**Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan**

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober  
terbit pertama kali April 1999

**Ketua Penyunting**

Kadeni

**Wakil Ketua Penyunting**

Saiful Rifa'i

**Penyunting Pelaksana**

R. Hendro Prasetianto

Udin Erawanto

Riki Suliana

Ekbal Santoso

**Penyunting Ahli**

Miranu Triantoro

Masruri

Karyati

Nurhadi

**Pelaksana Tata Usaha**

Yunus

Nandir

Sunardi

---

**Alamat Penerbit/ Redaksi :** STKIP PGRI Blitar, Jl. Kalimantan No. 111 Blitar, Telp. (0342) 801493.  
Langganan 2 nomor setahun Rp. 50.000,00 ditambah ongkos kirim Rp. 5.000,00.  
Uang langganan dapat dikirim dengan wesel ke alamat Tata Usaha.

---

**CAKRAWALA PENDIDIKAN** diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan ilmu Pendidikan PGRI Blitar. **Ketua :** Dra. Hj. Karyati, M.Si, **Pembantu Ketua :** M. Khafid Irsyadi, ST, M.Pd

---

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang-dalam jurnal ini. Naskah yang masuk ditelaah oleh Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Penyunting melakukan penyuntingan atau perubahan pada tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

---

## Petunjuk Penulisan Cakrawala Pendidikan

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik spasi rangkap pada kertas quarto, panjang 10-20 halaman, dan diserahkan paling lambat 3 bulan sebelum penerbitan, dalam bentuk ketikan di atas kertas sebanyak 2 eksemplar dan pada disket komputer IBM PC atau Kompatibel. Berkas naskah pada disket komputer diketik dengan menggunakan pengolah kata *Microsoft Word*.
2. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepustakaan, dan tinjauan buku baru.
3. Semua karangan ditulis dalam bentuk *esai*, disertai judul sub bab (heading) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul sub bab. Peringkat judul sub bab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, letaknya rata tepi kiri halaman, dan tidak menggunakan nomor angka, sebagai berikut :

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA TEBAL, RATA TEPI KIRI)

Peringkat 2 (Huruf Besar-kecil Tebal, Rata Tepi Kiri)

*Peringkat 3 (Huruf Besar-kecil Tebal, Miring, Rata Tepi Kiri)*

4. Artikel konseptual meliputi; (a) judul, (b) nama penulis, (c) abstrak (50-75 kata), (d) kata kunci, (e) identitas penulis (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan, (g) isi/ pembahasan (terbagi atas sub-sub judul), (h) penutup, dan (i) daftar rujukan. Artikel hasil penelitian disajikan dengan sistematika: (a) judul, b) nama-nama peneliti, (c) abstrak, (d) kata kunci, (e) identitas peneliti (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan berisi pembahasan kepustakaan dan tujuan penelitian, (g) metode, (h) hasil, (i) pembahasan, (j) kesimpulan dan saran, dan (k) daftar rujukan.
5. Daftar rujukan disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Anderson, D.W., Vault, V.D., dan Dickson, C.E. 1993. *Problems and Prospects for the Decades Ahead: Competency Based Teacher Education*. Barkeley: McCutchan Publishing Co.

Huda, N. 1991. *Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal*. Makalah disajikan dalam Loka Karya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian IKIP MALANG, Malang, 12 Juli.

Prawoto. 1998. *Pengaruh Penginformasian Tujuan Pembelajaran dalam Modul terhadap Hasil Belajar Siswa SD PAMONG Kelas Jauh*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: FPS IKIP MALANG.

Russel, T. 1993. An Alternative Conception: representing Representation. Dalam P.J. Nlack & A. Lucas (Eds.). *Children's Informal Ideas in Science* (hlm. 62-84). London: Routledge.

Sihombing, U. 2003. *Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat*. <http://www.puskur.or.id>. Diakses 21 April 2006.

Zainuddin, M.H. 1999. Meningkatkan Mutu Profesi Keguruan Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*. 1(1):45-52.

6. Naskah diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (Depdikbud, 1987).

**CAKRAWALA PENDIDIKAN**  
**Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan**  
 Volume 19, Nomor 2, Oktober 2016

---



---

**Daftar Isi**

Internalisasi Nilai-nilai Entrepreneurship Dalam Rangka Membentuk Perilaku Kewirausahaan Melalui Pendidikan Terintegrasi .....	159
<i><b>Ekbal Santoso</b></i>	
Kepemimpinan Dan Kecerdasan Emosional .....	168
<i><b>Kadeni</b></i>	
Peranan Layanan Bimbingan Dan Konseling Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di Sekolah .....	176
<i><b>Risaniatin Ningsih</b></i>	
Meningkatkan Peran Kelompok Penekan Dalam Percaturan Politik .....	192
<i><b>Miranu Triantoro</b></i>	
Fenomena Perilaku Sosial Komunitas Public United Not Kingdom (punk) .....	201
<i><b>Udin Erawanto</b></i>	
The Influence Of Gender In Language Usage .....	209
<i><b>Muchamad Arif</b></i>	
Using Sorogan Method In Learning English For Beginners .....	213
<i><b>M. Alimul Huda</b></i>	
Teaching Simple Present Tense Using Short Answers Game For The First-year Of University Students .....	218
<i><b>Annisa Rahmasari</b></i>	
Analisis Faktor Eksploratori Komponen Utama Penyebab Inflasi Di Kota Malang .....	224
<i><b>Annisa Larasati, Swasono Rahardjo</b></i>	
Analisis Model Antrian Peserta Pada Loker F Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan .....	231
<i><b>Laily Kurniawati, Swasono Rahardjo</b></i>	
Membangun Karakter (sikap) Partisipasi Peduli Lingkungan Pada Siswa Melalui Program BSM (Bank Sampah Malang) .....	237
<i><b>M. Syahri</b></i>	
Using Picture Book As Media To Improve Reading Motivation On Junior High School Student .....	250
<i><b>Farid Helmi Setyawan</b></i>	
Escalating Ideas Using Creative Visualization Technique In Writing Ability .....	256
<i><b>Wiratno</b></i>	
The Effectiveness Of KWL (Know, Want To Know, Learned) Technique In Teaching Reading For English Department Students .....	262
<i><b>Feri Huda</b></i>	
The Problem Of Translating English Phrases Into Indonesian For Islamic Scholar Of .....	269
<i><b>Pramudana Ihsan Maghfur</b></i>	

## MENINGKATKAN PERAN KELOMPOK PENEKAN DALAM PERCATURAN POLITIK

**Miranu Triantoro**  
*mir.stkip@gmail.com*  
**STKIP PGRI BLITAR**

**Abstrak :** Kelompok penekan dalam percaturan politik suatu negara merupakan sebuah fenomena yang tidak pernah bisa terelakkan, karena melalui peran inilah suatu kelompok dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh orang-orang yang mampu memenangkan pertarungan politik. Fakta telah menunjukkan bahwa dalam sejarah perjalanan sistem perpolitikan di Indonesia hingga sekarang ini kelompok penekan (*pressure group*) memiliki peran yang menentukan dalam membangun dan melaksanakan sebuah kebijakan yang berbasis pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, maka memperkuat posisi kelompok penekan dalam memberikan kontribusinya dengan memperkuat persatuan antar kelompok penekan, melakukan analisa terhadap kebijakan politik dan lobi-lobi politik maupun penyampaian usulan dan tuntutan serta aktivitas lain perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan bersama masyarakat yang lebih maju dan berkemakmuran.

**Kata Kunci :** Kelompok Penekan, Percaturan Politik.

**Abstract :** Pressure group in the political arena of a country is an inevitable phenomenon, through this action, the group can influence the policies made by government. Facts have shown that in the history of political system in Indonesia from past until now the pressure group has a decisive role in establishing and implementing a policy based on the interests of the people. Therefore, it is necessary to manage the position of pressure group in contributing to strengthen the unity among pressure groups, analyzing the policy and political lobbying as well as the submission of proposals and demands and other activities to achieve the common goal of society to be more advanced and prosperous.

**Key Words :** Pressure groups, political arena.

### PENDAHULUAN

Pasang surut perjalanan perpolitikan di Indonesia setelah kemerdekaan hingga masa reformasi belum mampu menunjukkan praktek demokrasi yang diharapkan sesuai dengan landasan konstitusional kita, yaitu sebuah demokrasi yang bercirikan musyawarah mufakat dengan mendasarkan diri pada hikmat kebijaksanaan. Berbagai macam perebutan kekuasaan, baik dalam bidang legislatif melalui pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil maupun pelaksanaan pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat masih berupa jargon-jargon yang belum mampu dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh berbagai masyarakat yang ada di negara Indonesia.

Berbagai calon dan kader politik yang berebut kekuasaan dalam pesta demokrasi belum mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai figur yang benar-benar mampu menyuarakan aspirasi dan berjuang untuk masyarakat secara luas, mereka masih banyak berjuang untuk kepentingan pribadi dan atau organisasi politiknya. Oleh karena

itu wajar jika dalam pelaksanaan pemilihan umum diwarnai dengan jumlah golongan putih yang cukup memprihatinkan.

Perubahan Orde Baru menuju Orde Reformasi yang diharapkan mampu mengangkat citra perpolitikan dan percaturan politik di Indonesia tidak serta merta mampu untuk merubah penampilan dan wajah politik yang aspiratif, tetapi hanya masih sekedar memberi peluang pada kelahiran partai-partai politik baru yang belum mampu berkiprah secara baik dalam membawa bangsa Indonesia menuju kepada pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan konsep demokrasi Pancasila yang mengedepankan prinsip musyawarah mufakat yang dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan persatuan menuju kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Fakta riil dalam perjalanan partai politik di Indonesia setelah orde baru jatuh akibat demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai kelompok penekan yang sukses dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik adalah munculnya 48 partai politik yang ikut dalam pesta demokrasi pada awal reformasi yakni pada tahun 1999 dengan sistem baru "Proporsional berimbang dengan sistem stelsel daftar, yang telah melahirkan pasangan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2004, yang diikuti oleh 24 partai politik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diselenggarakan pelaksanaan pemilihan presiden dua putaran, karena dari beberapa pasangan yang ada (dalam putaran pertama) tidak ada yang bisa mendapatkan suara lebih dari 50%, sehingga menyisakan dua calon pada putaran yang kedua, dengan, masing-masing calon Ibu Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Hazim Muzadi dan H.Susilo Bambang Yudoyono berpasangan dengan Mohammad Jusuf Kalla, yang pada pelaksanaannya dimenangkan

oleh pasangan Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla. Demikian juga dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang secara langsung dipilih oleh rakyat pada tahun 2009 dan 2014, yang melahirkan pasangan baru Joko Widodo sebagai Presiden dan Mohammad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil Pilihan Presiden, masih banyak menyisakan permasalahan-permasalahan disekitar tingkat partisipasi dan peran partai politik dalam mengusung kadernya dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Kondisi riil, ketidakmampuan partai politik dan rendahnya tingkat kedewasaan politik masyarakat lebih diperparah lagi dengan adanya berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang secara langsung juga dipilih oleh rakyat. Praktek politik uang (*money politic*), intimidasi, dan bahkan jual beli perkara di pengadilan akibat sengketa pemilihan kepala daerah telah mewarnai percaturan politik di Indonesia. Oleh karena itulah maka berbagai kelompok-kelompok masyarakat/kelompok penekan, berbagai elemen-elemen masyarakat perlu meningkatkan partisipasinya dalam mengawal pelaksanaan pemilu maupun pemilukada yang merupakan salah satu nafas dari negara demokrasi.

## **KELOMPOK PENEKAN**

### **Makna Kelompok Penekan**

Kelompok Penekan yang lazim disebut dengan istilah "Pressure Group" pada dasarnya merupakan sebuah kelompok atau organisasi yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan dan/ atau membuat tuntutan dalam rangka mempengaruhi pembuatan dan atau pelaksanaan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kemampuan kelompok atau organisasi ini tidak serta merta harus berada di lembaga formal pemerintahan, artinya mereka berusaha benar-benar mengajukan tuntutan-tuntutan demi pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik tanpa harus masuk dalam jaringan penguasa atau pemerintah. Hal ini selaras dengan konsepsi yang dikemukakan oleh Maurice Duverger (1984, vii-viii) yang mengemukakan “*any group or organization which by persuasion, propaganda, or other means, regularly attempts to influence and shape the policies of government*”, yang berarti bahwa kelompok kepentingan merupakan sebuah kelompok atau organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi kekuasaan pemerintah dengan menga-

jukan tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan dalam rangka membuat kebijakan.

Pemahaman akan konsep *pressure group*/kelompok penekan yang lebih berfokus pada upaya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik pemerintah sesuai dengan fenomena dan kepentingan rakyat yang diperjuangkan inilah dalam perkembangan selanjutnya seringkali diidentikkan dengan *interest group* atau kelompok kepentingan, walaupun sebenarnya memiliki perbedaan-perbedaan prinsip jika ditinjau dari beberapa aspek.

Diantara beberapa perbedaan antara kelompok penekan dengan kelompok kepentingan dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel**  
**Perbedaan antara kelompok penekan dan kelompok kepentingan**

NO.	SUDUT TINJAUAN	KELOMPOK PENEKAN	KELOMPOK KEPENTINGAN
1.	Arti	Sekelompok manusia yang bersatu (mengadakan persekutuan) dalam sebuah lembaga kemasyarakatan yang aktivitasnya diarahkan untuk memberikan tekanan kepada pihak penguasa (penentu kebijakan) agar mengakomodasi kepentingannya.	Sekelompok manusia yang bersatu (mengadakan persekutuan) dengan dilandasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan berusaha mempengaruhi kebijakan politik yang dibuat oleh lembaga-lembaga politik.
2.	Fokus/orientasi	Mempengaruhi dan menekan pejabat pemerintah untuk menyetujui tuntutan mereka	Proses perumusan kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah dan bagaimana mengartikulasi berbagai kepentingan tertentu kepada Pemerintah, sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok
3.	Sifat	Jangka Pendek	Jangka Panjang

Terlepas dari berbagai perbedaan tersebut di atas, sebenarnya baik kelompok penekan maupun kelompok kepentingan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau para wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif agar peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dibuat sesuai dengan kepentingan atau tuntutan yang sedang diperjuangkan bersama. Juga sama-sama tidak berusaha untuk menempatkan wakilnya duduk dalam lembaga perwakilan atau pemerintah.

### **Macam-macam Kelompok Penekan**

Dalam laju perkembangan sejarah bangsa Indonesia, mulai sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan, baik pada masa orde lama, orde baru, maupun orde reformasi saat sekarang ini, tidak pernah terlepas dari berbagai organisasi-organisasi yang berusaha menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat yang menuntut agar berbagai macam keinginan dan harapannya dapat terpenuhi demi peningkatan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat dan bukan hanya untuk sekelompok atau golongan tertentu saja.

Banyak berbagai organisasi yang mengatasnamakan masyarakat dari berbagai aspek atau bidang, baik politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, nelayan, perdagangan, perindustrian dan bahkan agama yang berusaha untuk melakukan lobi-lobi dan tuntutan-tuntutan untuk merealisasikan berbagai aspirasi anggota-anggotanya. Strategi yang ditempuh pun ada berbagai macam, baik secara keras/radikal hingga cara-cara yang bersifat persuasif (dengan cara halus) melalui internalisasi nilai-nilai yang diyakini.

Berdasarkan pada berbagai macam keanekaragaman bidang, bentuk tuntutan dan sifat yang ada pada masing-masing kelompok penekan, maka secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut :

#### **1. Kelompok Eksklusif dan kelompok Parsial.**

Sebuah kelompok penekan dika-

takan eksklusif manakala kelompok ini hanya mengambil tindakan dalam bidang politik saja dan ditekankan kepada kekuasaan politik. Hal ini biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang profesional dalam melakukan lobi-lobi politik. Setelah Orde Baru tumbang dan berganti dengan orde reformasi kita bisa melihat bagaimana sepak terjang Poros Tengah dalam menggolongkan tuntutan politiknya, sehingga mampu membawa Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Termasuk berbagai kasus yang berhasil diungkap setelah orde reformasi berjalan hingga sekarang ini. Misalnya terkait dengan Dana BLBI, Century, “cicak vs buaya” dan juga kasus-kasus korupsi yang melibatkan berbagai tokoh politik hingga berbagai pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya.

Sedangkan dikatakan parsial jika kegiatan politik mereka hanya merupakan salah satu bagian dari aktivitas yang dilakukan. Artinya jika mereka memiliki sebuah alasan-alasan yang memang mengharuskan dia terlibat kedalam agenda politik atau mungkin memiliki tujuan jangka panjang dengan melibatkan diri dalam rangkaian kegiatan politik. Hal ini biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan baik profesi maupun yang lain. Misalnya SPSI (Sarikat Pekerja Seluruh Indonesia), SBSI (Sarikat Buruh Seluruh Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), MUI (Majelis Ulama Indonesia), Organisasi-organisasi Pemuda dan Mahasiswa, dan lain-lainnya.

#### **2. Kelompok Swasta dan kelompok resmi.**

Yang dimaksud dengan kelompok swasta disini adalah kelompok penekan yang terdiri dari organisasi swasta yang memiliki anggota dan lingkup kegiatan pada bidang-bidang yang bersifat swasta. Kelompok swasta ini cenderung didirikan sebagai perpanjangan tangan pihak asing agar dapat ikut terlibat dalam perputaran



ekonomi, politik atau sub kehidupan lain di suatu negara yang ditunjuk. Sebaliknya kelompok resmi adalah kelompok penekan yang ruang lingkup dan anggotanya terdiri dari badan-badan resmi atau badan pemerintahan.

3. Kelompok-kelompok penekan Palsu.

Kelompok penekan palsu adalah organisasi-organisasi yang melancarkan tekanan-tekanan politik dengan tidak membentuk kelompok penekan, artinya hanya terdiri dari beberapa individu (baik teknokrat ataupun pakar/ahli) yang secara bersama-sama membentuk kelompok yang tidak selalu bekerja untuk diri mereka sendiri tetapi untuk orang lain ataupun sebuah badan tertentu.

Menurut Maurice Duverger (1984, 128) kelompok ini terdiri dari dua jenis kelompok penekan, yakni :

a. Kelompok penekan teknis.

Kelompok ini sebenarnya hanyalah organisasi teknis belaka, sehingga ada keragu-raguan untuk menyatakan sebagai kelompok penekan. Akan tetapi, pada kenyataannya mereka dapat melakukan tekanan-tekanan politik pada pemegang kekuasaan politik. Di antara beberapa contoh dari kelompok penekan teknis ini adalah :

1) *Komite pengumpul dana kampanye.*

Yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dana yang dilakukan dalam membiayai kampanye yang dilakukan oleh Partai dalam pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini bisa dilakukan terhadap para calon yang akan menduduki jabatan politik maupun dari partisipan-partisipan yang lain. Setelah sebuah partai atau seseorang menduduki jabatan politis atau kekuasaan, maka mereka dapat memberikan tekanan-tekanan agar mampu memberikan

keuntungan pada komite pengumpul dana yang bersangkutan. Secara riil kita dapat melihat bagaimana upaya yang telah dilakukan “SBY-Kalla Fans Club” sebagai wadah koordinasi penggalangan suara dari bawah, meskipun Yusuf Kalla mengatakan bukan sarana penggalangan dana untuk memuluskannya menjadi Presiden dan Wakil Presiden, dan hanya mengemukakan bahwa dana itu diperoleh melalui penggalangan dana dari kalangan pengusaha di Jakarta dan Bali. (<http://m.liputan6.com/news/read/78654/dana-kampanye-sby-kalla-rp-100-miliar>, diakses tanggal 7 September 2016).

Berbeda dengan pemilihan Presiden tahun 2014 antara Jokowi-Jk dan Prabowo-Hatta kedua pasangan calon Presiden, sama-sama membuka rekening untuk pihak-pihak tertentu yang memberikan sumbangan bagi pelaksanaan kampanye, untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPU.

2) *Lobby.*

Yang dimaksud dengan lobby disini adalah sebuah organisasi atau badan khusus yang memberikan pelayanan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuannya, dengan memberikan upah tertentu tanpa melihat dari sudut pandangan politik yang bersangkutan, untuk bertindak atas nama mereka atau peminta bantuan tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya lobi ini dapat dilakukan oleh individu-individu atau organisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan atau menyamakan persepsi mengenai tujuan-tujuan politik tertentu. Misalnya saja apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat ketika menunjuk Ruhut Sitompul menjadi

Ketua Komisi 3 menggantikan Gede Pasek Suardika ditolak oleh sejumlah anggota komisi, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua fraksi demokrat sebagai berikut “Yang jelas sebagai ketua fraksi kami akan segera melakukan lobi-lobi politik dan itu sebuah keniscayaan dan itu bukan hal dilarang”. (<https://www.merdeka.com/politik/ruhut-ditolak-demokrat-pasang-badan-lobi-politik-dilakukan.html>, diakses tanggal 7 September 2016).

### 3) Biro-biro propaganda swasta.

Dalam hal ini aktivitas yang dilakukan bersifat parsial dan dapat dilakukan dengan cara membagikan poster-poster, brosur-brosur dan risalah-risalah politik pada partai-partai dan kandidat-kandidat yang mengontraknya.

#### b. Surat kabar dan Media Informasi.

Surat kabar dan media informasi ini dapat dimasukkan kedalam kelompok penekan palsu, karena di dalamnya banyak ditemukan tenaga-tenaga teknis yang dapat melancarkan tekanan-tekanan politik melalui media-media yang diterbitkan baik melalui artikel di sebuah koran atau majalah, berita-berita di sebuah radio maupun di televisi-televisi. Dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 antara Jokowi–JK dengan Prabowo – Hatta, salah satunya kita bisa melihat dari TV swasta yang melakukan afiliasi dan keberpihakan dian-tara pasangan calon, misalnya TV One dan Metro TV.

## PERCATURAN POLITIK

Politik adalah sebuah “permainan” yang mengarah kepada bagaimana sebuah kekuasaan, kedudukan atau sebuah pertaruhan dapat dimenangkan. Oleh karena itu

kecenderungannya adalah bagaimana seseorang yang terlibat dalam kompetisi politik dapat memenangkannya, sehingga disinilah diperlukan adu strategi dan teknik atau taktik yang mampu mengajak dan menggerakkan seluruh elemen yang ada untuk bersama-sama mencapai tujuan tersebut. Terkait dengan strategi dan teknik, maka jangkauan seseorang harus lebih luas dan panjang, ibarat dalam sebuah istilah kemiliteran adalah “*To win the war, not to win the battle*” yang berarti memenangkan perang, bukan memenangkan pertempuran. Dengan kata lain bahwa diperlukan sebuah strategi untuk memenangkan perang dan taktik untuk memenangkan pertempuran.

Berdasarkan pada konsep pemikiran di atas, maka percaturan politik adalah sebuah permainan yang penuh dengan strategi dan taktik untuk memenangkan sebuah kompetisi politik yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai implementasi demokrasi Pancasila yang berupa pemilu anggota legislatif, pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Satu (Gubernur dan Wakil Gubernur), Pemilihan Kepala Daerah Tingkat dua (Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota) hingga pilihan-pilihan Kepala Desa hingga perangkat bawahnya) merupakan contoh dari percaturan politik yang terjadi di dalam negeri. Sedangkan percaturan politik di luar negeri sangat terkait dengan politik luar negeri yang ada di negara kita, yakni “Politik Bebas Aktif”. Terkait dengan Implementasi politik bebas aktif ini, menurut Iswara Ananda Lestari ada tiga langkah atau hal yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk memegang posisi strategis dalam forum internasional, yakni *Pertama*, Memperkokoh stabilitas keamanan dalam negeri dan stabilitas politik domestik, dengan mempersempit dan menghancurkan ruang gerak segala bentuk tindakan kriminal, anarkis dan pergerakan vandalisme yang mengatasnamakan agama, lalu sebisa

mungkin membuka berbagai ruang diskusi yang cerdas, demokratis dan terbuka agar masyarakat tidak mudah disesatkan oleh propaganda asing yang belum tentu benar. *Kedua*, memperkuat kerjasama Ekonomi dan Keamanan regional dengan Negara-negara ASEAN, agar tercipta zona stabilisasi dan kondusif ASEAN, untuk merangsang gairah investasi ke daerah. *Ketiga*, Indonesia harus lebih berperan aktif dan meningkatkan posisi tawarnya di berbagai forum kerja sama internasional seperti di forum PBB, KAA, OKI, APEC, dan organisasi multilateral lain yang diikuti Indonesia. Kemudian dalam kerjasama multilateral dan politik internasional Indonesia jangan terpancing oleh berbagai intimidasi, intervensi, rayuan dan terlibat dalam konflik internasional yang justru akan menyulitkan posisi tawar Indonesia di kemudian hari. Selamat dan sukses Penyelenggaraan KAA. (<http://suaradewata.com/read/2015/04/11/1063/Posisi-Indonesia-Dalam-Percaturan-Politik-Internasional.html>, diakses tanggal 8 September 2016).

### **MENINGKATKAN PERAN KELOMPOK PENEKAN**

Era reformasi yang salah satunya ditandai dengan berbagai aktifitas masyarakat yang luar biasa dalam mengekspresikan diri setelah terkungkung dengan orde baru karena banyak menekankan pada strategi stabilitas keamanan menunjukkan bahwa masyarakat benar-benar memerlukan wadah yang mampu menyalurkan berbagai aspirasi yang dimilikinya demi perbaikan keadaan bangsa yang “dirasakan” semakin tidak menunjukkan perlakuan yang tidak seimbang antar kelompok masyarakat yang ada dalam keanekaragaman bangsa Indonesia, baik kelompok minoritas maupun kelompok mayoritas, kelompok-kelompok agama, suku, bangsa dan lain sebagainya.

Berbagai organisasi dan kelompok-

kelompok di masyarakat tumbuh “bak jamur di musim penghujan”, dan meliputi berbagai bidang atau aspek yang senantiasa berusaha secara aktif untuk memberikan pengaruh dan tekanan-tekanannya kepada seluruh pejabat negara (supra struktur politik : MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KPK dan lembaga-lembaga negara lain), baik dengan melalui penyampaian tuntutan-tuntutan secara terbuka maupun dengan melakukan lobi-lobi agar kepentingannya diakomodir dalam sebuah kebijakan politik yang akan dihasilkan atau diputuskan oleh Pemerintah.

Dengan mencermati berbagai fenomena kehidupan politik dan sistem pemerintahan yang berkembang saat ini, yang ditandai dengan sebuah “kebebasan yang tidak berkepribadian dan berkebudayaan” maka diperlukan peran serta dan partisipasi semua pihak untuk bersama-sama menciptakan situasi dan kondisi yang bersifat kondusif dalam rangka membangun dan membenahi tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran.

Kelompok penekan yang merupakan salah satu pilar dalam sistem demokrasi Pancasila sudah barang tentu memiliki peran dan tanggung jawab moral dalam mengawal, mengerahkan dan mengendalikan berbagai komponen bangsa untuk tetap berada pada relnya yaitu tercapainya tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinia IV, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks inilah maka berbagai kebijakan-kebijakan politik harus dibuat oleh lembaga-lembaga politik (supra struktur politik) yang memiliki kewenangan untuk membuatnya, baik oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif.

Sedangkan infra struktur politik, baik partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi-organisasi lain yang sejenis dapat memberikan masukan-masukan yang berarti baik melalui wakilnya yang sengaja didudukkan pada sebuah jabatan dan lembaga politik maupun melalui berbagai usulan secara pribadi maupun organisasi yang disampaikan baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan.

Sebagai sebuah kelompok penekan yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintah agar mengabdikan tuntutan yang disampaikan, maka ada beberapa langkah yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perannya dalam percaturan politik/ pemerintahan. Diantara langkah peningkatan peran tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Memperkokoh persatuan diantara kelompok penekan.

Dalam sebuah sistem demokrasi keberadaan kelompok penekan cenderung berkembang sesuai dengan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan kondisi riil semacam itu maka berbagai macam kelompok penekan tersebut dapat bekerjasama untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka yang bersamaan, Artinya kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat dapat dipersatukan dengan adanya "tuntutan yang sama". Sehingga kehadiran mereka benar-benar dapat diperhitungkan oleh pemerintah dan/atau pengambil kebijakan politik.

2. Melakukan analisa terhadap berbagai kebijakan dan lobi-lobi politik.

Kelompok-kelompok penekan harus senantiasa memiliki analisa yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan politik, yang tidak hanya sekedar mengarah kepada stabilitas politik, akan tetapi juga terkait dengan pengaturan sistem politik yang berlaku dan diberlakukan.

Salah satu contohnya adalah bagaimana sistem kepartaian dan pemilihan umum (anggota legislatif dan Presiden/Wakil Presiden) serta pemilihan kepala daerah tingkat I dan II yang diterapkan di Indonesia, Kita bisa melihat betapa semenjak Orde Baru Partai Politik tidak bisa berkembang dengan baik, sehubungan dengan sistem yang diterapkan pada saat itu yang hanya terdiri dari PPP, PDI dan Golkar dan itupun banyak dikendalikan oleh Pemerintah yang berkuasa. Namun demikian semenjak jatuhnya orde baru dan beralihnya ke Orde Reformasi Partai Politik sangat luar biasa banyaknya, sehingga perlu pembatasan-pembatasan dan pengaturan yang secara rasional dapat diterima oleh semua pihak. Disamping juga adanya perubahan sistem pemilu maupun pemilukada/ pilkada yang dilakukan secara langsung.

Berbagai macam kebijakan-kebijakan politik inilah yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai sarana dan wahana bagi kelompok-kelompok penekan untuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya jikalau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila melalui lobi-lobi politik yang dilakukan secara informal maupun kelembagaan.

3. Melakukan usulan-usulan dan tuntutan.

Wujud nyata dari peran kelompok penekan adalah usulan-usulan dan tuntutan-tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah atau pengambil kebijakan politik negara. Dalam hal ini usulan-usulan dan/atau tuntutan-tuntutan yang disampaikan dapat dilakukan secara lisan melalui dengar pendapat dengan lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif, dapat juga secara tertulis melalui beberapa media dan wakilnya yang duduk dalam lembaga-lembaga politik, serta dapat pula disampaikan melalui demonstrasi-

demonstrasi atau orasi ilmiah ketika sedang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan peran kelompok penekan dalam percaturan politik ini, merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam bidang politik yang sekaligus menjadi prasarat dari sebuah negara demokratis. Oleh karena itu maka sebagai seorang warga negara yang memiliki kemampuan untuk menganalisa dan melihat perkembangan politik menuju sebuah tatanan kehidupan yang semakin baik dan mensejahterakan masyarakat, hendaknya senantiasa melibatkan diri dalam setiap upaya konkrit untuk menuju tercapainya tujuan nasional yakni tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Duverger, Maurice. 1984. *Party Politics and Pressure Groups A Comparative*, dialih bahasakan oleh Laila Hasyim, disunting oleh Affan Gafar, Partai politik dan Kelompok Penekan, Jakarta: Bina Aksara.
- Firdaus, Rendy Ferdy. 2013. *Ruhut ditolak, Demokrat pasang badan, Lobi politik dilakukan*, (<https://www.merdeka.com/politik/ruhut-ditolak-demokrat-pasang-badan-lobi-politik-dilakukan.html>, diakses tanggal 7 September 2016)
- Lestari, Iswara Ananda. 2015. *Posisi Indonesia Dalam Percaturan Politik Internasional*, (<http://suaradewata.com/read/2015/04/11/1063/Posisi-Indonesia-Dalam-Percaturan-Politik-Internasional.html>, diakses tanggal 8 September 2016)
- Liputan 6. 22 Mei 2004, 09.29 WIB. *Dana Kampanye SBY-Kalla Rp. 100 Milyard*, (<http://m.liputan6.com/news/read/78654/dana-kampanye-sby-kalla-rp-100-miliar>, diakses tanggal 7 September 2016)